

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021

Waktu : 10.00 WITA-Selesai

**Tempat : Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu
: Budaya, Universitas Hasanuddin**

PENGUNGS DI KOTA PAREPARE TAHUN 1950-1965



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya**

Universitas Hasanuddin

Oleh:

NUR ASISKA

Nomor Pokok: F811 16 513

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

SKRIPSI

PENGUNGSI DI KOTA PAREPARE TAHUN 1950-1965

Disusun dan diajukan oleh:

NUR ASISKA

F811 16 513

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 04 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010

Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin



Dr. Nahdia Nur, M.Hum.
NIP. 19650321 199803 2 001

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Kamis, 04 Februari 2021, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

PENGUNGSI DI KOTA PAREPARE 1950-1965

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.



Makassar, 04 Februari 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

1. Dr. Amrullah Amir, M.A

Ketua

2. Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si

Sekretaris

3. Dr. Ilham, M.Hum

Penguji I

4. A. Lili Evita, S.S., M.Hum

Penguji II

5. Dr. Amrullah Amir, M.A

Konsultan I

6. Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si

Konsultan II

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ASISKA

NIM : F811 16513

Departemen : Ilmu Sejarah FIB Unhas

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri. Jika di kemudian hari ternyata ditemukan Plagiarisme maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku dan saya bertanggung jawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar, 22 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

 
Nur Asiska
F811 16 513



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya, serta petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan melalui tahapan yang panjang selama berada di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin. Walaupun tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis hadapi.

Penulisan skripsi ini yang berjudul: “**Pengungsi di Kota Parepare 1951-1965**” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala dan hambatan yang penulis alami, proses pengerjaannya dalam situasi Pandemi Covid-19 dan juga tertutupnya Arsip karna dalam proses renovasi sehingga menghambat terutama dalam mencari sumber-sumber dan literature yang berhubungan dengan objek kajian, tetapi dengan usaha dan tekad yang besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi mahasiswa sejarah. Penulis banyak mendapat pelajaran, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orang tua, ayahanda **Lahang** dan Ibundaku **Saharia** yang tiada hentinya memberikan doa yang tulus, kasih sayang, pengorbanan, pengertian, semangat, serta dorongan, selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin sampai pada akhir tahapan ini. Untuk mereka tiada kata yang bisa penulis sampaikan selain terima kasih yang tak terhingga karena tanpa mereka penulis tidak bisa menyelesaikan pendidikan. Penulis juga sampaikan terimakasih kepada kakak-kakak penulis **Herlina, Aras, Safarullah S.M, dan Wahyudin S.Pd.** yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan materi kepada penulis. Tak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada teman kecil hingga sampai saat ini **Mardatillah** dan **Irdyanti** yang sudah penulis anggap sebagai adik sendiri.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Penulis sangat berterima kasih kepada **Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si** selaku pembimbing kedua yang selalu meluangkan waktu untuk membagikan ilmu, waktu dan masukannya. Mulai dari pencarian literature bacaan dan arsip, serta meluangkan waktu membaca dan mengoreksi tulisan penulis. Tanpa mereka penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. **Dr. Bambang Sulistyو Edi Purwanto, M.S.,** selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama 3 tahun lebih semenjak penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Nahdia Nur, M.Hum** dan **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. Ag.,** selaku Sekretaris departemen. Terima kasih juga kepada seluruh staf dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, **Alm Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A., Almarhuma Margriet Mokka Lappia, S.S., M.S., Dr. Suriadi Mappangara, M.hum., Dr. Ilham, S.S., M.Hum., Dr. Bahar Akkase Teng, Lep., M.Hum., A. Lili Evita, S.S., M.Hum., Dr. Muslimin AR Effendy, M.A., Drs. Dias Pradadimara, M.a., Nasihin, S.S., M.A.,** atas segala ilmu dan pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada **Uddjie Usman Pati S.Sos.,** selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah.
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya, terkhususnya kepada staf pegawai yang telah membantu segala jenis pengurusan berkas penulis selama berada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
5. Teman-teman seperjuangan penulis di Depaertemen Ilmu Sejarah angkatan 2016, **Rahmadi, Allu, Rais, Acmar, Ammar, Hendra, Erwin G, Erwis S,**

Isman, Alle, Burhan, Arafah, Ical, Alam, Fahrul, Eve, Pitto, Intan Rifana, Kiki, Ega, Tati, Jusni, Erni, Ben, Nisa, Dayen, Selfi, Sinar, dan Intan DW yang telah bersama-sama dengan penulis dalam mengikuti pendidikan selama 4 tahun lebih di Universitas Hasanuddin. Semoga kita bisa sukses bersama-sama.

6. Kepada keluarga besar HUMANIS KMFIB-UH, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran sangat berharga seperti menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan yang tidak bisa penulis dapatkan dalam perkuliahan.
7. Teman-teman KKN Angkatan 102 Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, **Icad , Fery, Haidir, Rifqah**, Serta teman tidurku selama sebulan **Riska, Cece, dan Fira**.
8. Untuk **Epe** dan **Pitto** sahabat sejati dan sejiwaku selama 4 tahun lebih, dari maba hingga sekarang, melewati susah senang bersama, semoga selalu seperti ini dan tidak ada yang saling melupakan.
9. Sahabat *Recehkuh* **Rahmadi, Allu, Rais, Pitto, Epe**, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk hari-hari yang penuh tawa dan juga gibah. Kalian terbaik 😊
10. Untuk **Rahmadi**, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk tiga tahun ini, terima kasih juga karena sudah sangat berjasah dan setia menemani dalam keadaan apapun hingga terciptanya tulisan ini.

Makassar, 04, Februari, 2021

NUR ASISKA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Penelitian.....	1
1.2. Lingkup Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
1.6. Tinjauan Pustaka.....	11
1.7. Metode Penelitian	14
1.8. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM.....	18
2.1. Keadaan Alam	18
2.1.1 Letak Geografis	18
2.1.2 Iklim dan Cuaca	23
2.1.3 Keadaan Tanah.....	24
2.2. Penduduk dan Matapencarian	24
2.3. Sejarah Singkat Parepare Sampai Tahun 1965.....	27
BAB III	
PENYEBAB PENGUNGSIAN PENDUDUK.....	37
3.1. Gangguan Keamanan.....	37

3.2. Krisis Ekonomi	58
3.3. Keresahan Sosial	63
BAB IV KEHIDUPAN PENGUNSI DI KOTA PAREPARE	67
4.1. Kedatangan Pengungsi.....	67
4.2. Upaya Pemerintah	74
4.3. Kehidupan Sosial.....	79
BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.1. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1	: Peta Jalur Pengungsi Kota Parepare.....	xv
Gambar 2	: Peta Kota Parepare Tahun 1961.....	18
Tabel 1	: Daftar Barang Yang Dicuri Oleh DI/TII.....	52
Tabel 2	: Kampung Yang dikuasai TNI Dan DI/TII.....	58
Tabel 3	: Pengungsi Mamuju Yang Berada Di Kota Parepare.....	71
Tabel 4	: Statistik kedatangan pengungsi ke Kota Parepare.....	73
Tabel 5	: Penjaman Pengungsi Untuk Keperluan Nelayan.....	83
Tabel 6	: Perhitungan Pemakaian Uang Kontan Rp. 250,-.....	84

ABSTRAK

Nur Asiska (F8116513), dengan judul “Pengungsi di Kota Parepare 1950-1965”, dibimbing oleh Dr. Amrullah Amir, S.S. M.M. dan Dr. Abd, Rahman Hamid, M.Si.

Skripsi ini merupakan pembahasan tentang pengungsi penduduk di Kota Parepare. Penelitian ini menjawab dua permasalahan yaitu penyebab pengungsi dan kehidupan pengungsi di Kota Parepare. Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan data berupa arsip, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga penyebab terjadinya pengungsian penduduk yaitu gangguan keamanan, krisis ekonomi, dan keresahan sosial yang ditimbulkan oleh DI/TII, gerombolan liar, dan TNI. Akibat gangguan keamanan masyarakat takut tinggal di kampungnya. Masyarakat tidak bisa bekerja dengan rasa aman karena selalu merasa takut berada di tempat bekerja. Bukan saja krisis ekonomi tetapi juga keresahan sosial. Setelah sampai di Kota Parepare para pengungsi mendapat bantuan dari pemerintah berupa bantuan makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Di sana mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya mereka bekerja sesuai kemampuan yang mereka miliki. Jika dulunya mereka di kampung sebagai petani mereka bisa memanfaatkan lahan kosong yang ada untuk bertani. Sedangkan yang dulunya bekerja sebagai nelayan di kampungnya, mereka bisa memanfaatkan bantuan peminjaman alat-alat untuk menangkap ikan dari pemerintah. Banyak juga dari mereka bekerja yang lain seperti buruh, tukang kayu, dan tukang batu.

Kata Kunci: DI/TII, TNI, gerombolan, pengungsi, Kota Parepare.

ABSTRACT

Nur Asiska (F81116513), with the title “Refugees in the City of Parepare 1950-1960”, guided by Dr. Amrullah Amir, S.S. M.A. and Dr. Abd, Rahman Hamid, M.Si.

This thesis is a discussion about refugees in the City of Parepare. in this study using historical methods by collecting data in the form of archives, interviews and literature study. The results showed that there were there causes of population displacement, namely security distrubances, economic crises, and sosial unrest caused by DI/TII, gangs, and the TNI. Due to security disturbances, people are afraid to live in their village. People cannot work with a sense of security because they always feel afraid to be at work. Not only the economic crisis but also social unrest. After arriving in the city of Parepare, the refugees received food, shelter and clothing assistance. There they have to work to make ends meet. Usually they work according to the abilities they have. If they used to work as farmers in their village, they could use the existing vacant land for farming. Meanwhile, those who used to work as fishermen in their village can use it by borrowing fishing gear from the government. Many of them also worked for other people, such as laborers, carpenters and masons.

Keyword: DI/TII, TNI, gangs, Refugees, Parepare

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Penelitian

Catatan sejarah Indonesia tahun 1950-an merupakan periode yang diperhadapkan pada masalah integrasi bangsa. Banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan pada sistem politik, pemerintahan, ekonomi dan masalah sosial. Kebanyakan permasalahan yang terjadi di daerah merupakan adanya faktor kekacauan yang terjadi di pusat, dan tidak dapat dipungkiri negara Indonesia merupakan negara yang baru merdeka.

Salah satu permasalahan awal tahun 1950-an di Sulawesi Selatan adalah pengungsi akibat kekacauan yang berdampak buruk bagi masyarakat. Banyak dari mereka memilih untuk mengungsi karena sering mendapat tindakan yang tidak baik dari DI/TII dan gerombolan.

Pengungsi itu sendiri dapat diartikan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu permasalahan dan mencari tempat yang terasa aman, di tempat sebelumnya mereka dilanggar haknya, hasil mata pencarian mereka dirampas, mereka dibunuh, sehingga mereka terpaksa malarikan diri.¹ Pengungsi juga dapat disebabkan oleh ulah manusia sendiri seperti kekacauan, gerakan yang dilakukan oleh DI/TII dan gerombolan. Setiap pengungsi biasanya

¹ Karita Sakharani dan Kadarudin. *Hukum Pengungsi Internasional*, (Makassar: Pustaka Pena, 2016), hlm. 15.

ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurus dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat yang tidak bisa diprediksi. Tergantung dari kondisi dan situasi itu sendiri. Biasanya pengungsi diurus oleh pemerintah setempat, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk datangnya bantuan dari relawan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah *ungsi* dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang memberikan rasa aman.² Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bahaya yang disebabkan bencana alam seperti banjir, gempa, tanah lonsor, dan sebagainya. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia seperti konflik bersenjata, penindasan kekerasan, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara manapun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.³

Salah satu penyebab pengungsi adalah masalah gangguan keamanan yang diakibatkan oleh para DI/TII dan gerombolan⁴. Ditandai dengan pengungsian yang

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 657)

³ Achmad Romsan, dkk. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. (Bandung: Sanic Offset, 2003), hlm. 35.

⁴ Gerombolan atau kelompok merupakan suatu istilah yang dipakai oleh pemerintah terhadap para pemberontak, dalam tulisan ini istilah kata gerombolan dipakai terhadap kelompok yang tidak tergabung ke dalam DI/TII, baik itu gerombolan liar maupun gerombolan lain.

mempengaruhi demografi penduduk serta kekerasan-kekerasan yang tidak saja datang dari pemberontak, tetapi juga dari kalangan militer, dan bandit itu sendiri. Masyarakat merasa terganggu karena tidak dapat melaksanakan tugas dalam menjalani kesehariannya secara teratur. Kemudian dampaknya semakin luas akibat gerakan tersebut setelah semakin meningkatnya tindak kriminalitas dari tahun-ketahun seperti pencurian barang maupun orang, pembunuhan, serta tindakan kekerasan lainnya yang terjadi dalam periode tahun 1950-an.

Pada tahun 1950-an di Sulawesi Selatan umumnya merupakan tahun yang penuh gejolak dan kekacuan. Banyaknya aksi DI/TII dan gerombolan yang terjadi maupun aksi militer dalam melakukan operasi untuk pemberantasan para pemberontak maka berdampak bagi kehidupan masyarakat pada daerah tersebut. Dengan hal seperti itu masyarakat merasa cemas atau merasa tidak aman sehingga mereka memilih untuk meninggalkan kampung halaman mereka untuk mengungsi ketempat yang lebih aman. Pengungsian dilakukan karena beberapa alasan seperti bencana alam dan terjadinya konflik yang berlatar belakang kepentingan politik, ras maupun agama.

Pada tahun 1950-an banyak masyarakat yang mengungsi ke tempat lain karena terjadinya konflik. Gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar yang berorientasikan Islam, maka pada tahun 1953, mereka mulai menarik pajak atas nama Negara Republik Islam dan menerapkan hukum Islam secara ketat di wilayah kekuasaan mereka di Sulawesi Selatan, selain itu mereka juga melakukan kebijakan seperti pembaharuan kepemilikan tanah (*Landreform*), penghapusan ketidakadilan sosial,

pelarangan gaya hidup mewah seperti memakai emas, perhiasan dan sutra, atau pesta pernikahan yang berlebih-lebihan. Kebijakan lain mereka adalah penghapusan sisa-sisa feodalisme termasuk pemerintah tradisional dan gelar kebangsawanan, serta pelarangan “kepercayaan tradisional”.⁵ Seperti yang terjadi di kampung Aroppoe DI/TII mulai memungut pajak berupa padi dari rakyat, di kampung tersebut dengan cara pemaksaan menggunakan kekerasan.⁶

Banyak diantara penduduk yang tidak mendukung pemberontakan karena membuat penduduk ketakutan serta meresahkan bagi mereka, menyebabkan penduduk terpaksa harus mengungsi ke kota-kota besar di Sulawesi Selatan, terutama mereka yang berasal dari golongan bangsawan (kecuali sebagian kecil yang bersedia menanggalkan gelar dan berpihak kepada DI/TII) dan orang-orang yang masih berpandangan tradisional. Penduduk yang tidak pro terhadap pemberontakan dan dianggap mata-mata pemerintah maka mereka dibunuh, rumahnya dibakar atau bahkan diperkosa oleh para pemberontak. Penduduk yang masih bertahan di desa tempat mata pencaharian mereka berarti mereka harus meninggalkan semua tradisi mereka dan praktik kepercayaan yang sudah mendarah daging bagi mereka, bersedia memutuskan hubungan dan barang kebutuhan dari kota, dan resiko paling besarnya mereka akan dicap sebagai simpatisan pemberontak.⁷

⁵ Christian Pelras. *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), hlm. 336.

⁶ Arsip Barru 1951-1961, Reg 189. *Surat-surat masuk yang berhubungan dengan tindakan gerombolan DI/TII Lompotengnga dan kampung Mareto*.

⁷ Christian Pelras, *Loc cit*.

Hal ini membuat masyarakat ketakutan, jika mereka diketahui membantu pemberontak mereka akan dipenjarakan oleh TNI, dan jika mereka diketahui membantu TNI maka mereka dibuat sengsara oleh pemberontak. Jalan satu-satunya adalah jika ingin lepas dari keadaan serba salah mereka harus bersiap hidup terlantar sebagai pengungsi jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, sering kali tanpa sumber penghasilan. Beberapa diantara mereka menampung di kediaman bekas patron, bekas patron tersebut juga berstatus sebagai pengungsi sehingga tidak banyak membantu. Sebagian lagi menggantungkan diri kepada sanak keluarga mereka di kota yang sering kali mengalami kesulitan yang sama, banyak pula yang memilih merantau ke Sulawesi tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, atau Tanah Melayu.⁸

Gerakan DI/TII dan gerombolan sangat berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat banyak kehilangan harta benda mereka akibat perampokan. Hewan ternak pun tak luput dari sasaran para gerombolan dan juga pasukan DI/TII, bisa dikatakan masyarakat ketakutan dan trauma tinggal di kampungnya maka rakyat pun mengungsi ke daerah aman, karena mereka tidak tahan lagi selalu diteror dan diculik. Sehingga kehidupan sosial lumpuh, warga jadi takut ke pasar karena mereka trauma dengan penculikan dan perampokan.⁹ Aksi DI/TII dan gerombolan tersebut semua berdampak terhadap kehidupan masyarakat, kegiatan gerombolan sangat

⁸ *Ibid.*, hlm. 337.

⁹ Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi 1946-1960, Reg 891. *Laporan-laporan Tahun 1958-1959*.

berdampak bagi kehidupan ekonomi pada saat itu. Secara keseluruhan semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan mengalami kekurangan beras, sehingga tidak dapat dihindari untuk mengimpor beras dari luar.¹⁰

Salah satu tujuan para pengungsi pergi ke kota adalah karena alasan keamanan, salahsatunya Kota Parepare. Kota Parepare merupakan salah satu kota terpenting di Sulawesi Selatan yang terletak kurang lebih 155 km di sebelah utara Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.¹¹ Kota ini memiliki posisi strategis dalam lintas perdagangan baik antar daerah maupun antar pulau. Hal ini didukung karena merupakan kota pelabuhan yang menghubungkan antara kota Parepare dengan berbagai daerah di Indonesia bahkan langsung ke Malaysia, disamping itu Parepare juga merupakan jalur lalu lintas darat yang menghubungkan berbagai daerah khususnya ke daerah-daerah utara seperti Pinrang, Sidrap, Tana Toraja, Enrekang, Luwu dan juga merupakan jalur Trans Sulawesi.¹²

Jumlah penduduk Kota Parepare tahun 1950 sebanyak 370.088 orang sedangkan pada 1952 melonjak menjadi 550.011 orang.¹³ Hal tersebut kurang lebih

¹⁰ Zainal Jasni, “*Ekonomi Swadaya Membangun Daerah Untuk Kemakmuran Bangsa Dengan Case Study : Sulawesi Selatan*”, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), hlm. 30.

¹¹ Kantor Statistik TK II Kotamadya Parepare, *Parepare Dalam Angka 1993* (Parepare Cabang Perwakilan BPS Kantor Statistik Kotamadya Parepare, 1942), hlm. 1.

¹² Trans Sulawesi adalah jalan penghubung antara daerah-daerah yang ada di Sulawesi. Dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Sulawesi Selatan. *Pemerintahan Daerah Kotamadya Parepare Volume I Periode tahun 1889-1981*, (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017), hlm. vi.

¹³ Arsip Parepare Vol 1, Periode Tahun 1881-1981. Reg 1. 741, *Berita Acara Pengoporan Gudang SKP, SMA, dan SMP Parepare Kepada Pemerintah*.

dipengaruhi karena banyaknya pendatang dari daerah lain yang masuk ke Kota Parepare untuk berdagang, mencari pekerjaan di kota dan memutuskan untuk menetap di kota Parepare.

Sejarah merupakan masa lalu yang berhubungan dengan manusia, sejarah merupakan proses atau perubahan di dalam kehidupan masyarakat baik yang secara individu maupun melibatkan orang lain. Dengan meningkatnya dan berkembangnya ilmu pengetahuan di tengah arus globalisasi, merupakan tantangan tersendiri bagi disiplin ilmu sejarah untuk menghasilkan suatu informasi atau karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi semua orang.

Perspektif tentang nilai guna sejarah memang tidak mudah disamakan antara yang belajar sejarah dan mereka yang tidak memahami sejarah. secara umum, guna sejarah dapat dibagi menjadi empat, yaitu guna edukatif (pendidikan), inspiratif (wawasan), interaktif (dialog) dan rekreatif (kesenangan).¹⁴Kesadaran sejarah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa. Ilmu sejarah tampaknya merupakan medan pergulatan intelektual yang masih jauh dari kata selesai, mengingat sejarah sebagai masa lampau yang terjadi hanya sekali saja dan tidak mungkin berulang kembali yang mencerminkan dan mempertanggungjawabkan zamannya. Untuk itu dalam usaha merekonstruksinya diperlukan metode sejarah, konsep dan teori. Nilai sejarah semakin rendah apabila sejarawan dipengaruhi oleh

¹⁴ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 73.

kecenderungan terhadap kepercayaan, kepentingan politik ataupun rancangan yang telah digariskan.

Tugas seorang sejarawan merekonstruksi peristiwa berdasarkan metode-metode ataupun kaidah sejarah melalui suatu historiografi yang selalu berinteraksi dengan fakta dan sumber-sumber pendukungnya. Dalam pengertian yang umum, seorang sejarawan melakukan hal itu untuk menyadarkan sesama mengenai masa silam.¹⁵

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya tentang pentingnya kesadaran sejarah, maka penulis menelusuri dan mengungkap suatu permasalahan yang berhubungan dengan pengungsian penduduk akibat gerakan DI/TII dan gerombolan yang melanda daerah Sulawesi Selatan yang terjadi pada tahun 1950-1965. Terdapat beberapa alasan sehingga penulis melakukan penelitian ini yaitu:

- 1) Dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa bukan hanya kelompok gerakan DI/TII yang membuat masyarakat ketakutan sehingga membuat masyarakat mengungsi, akan tetapi gerakan gerombolan juga cukup membuat masyarakat ketakutan.
- 2) Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa ada pengungsi yang datang melalui pemerintah dan ada yang datang sendiri, setelah sampai di Kota Parepare mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Serta bagaimana kehidupan para pengungsi selama berada di pengungsian.

¹⁵ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 1995), hlm. 18-19.

Dari melihat berbagai tulisan sejarah sebelumnya banyak yang telah membicarakan keresahan-keresahan masyarakat akibat aksi gerakan DI/TII dan gerombolan tersebut, tetapi masih kurang perhatian terhadap akibat adanya keresahan tersebut. Masyarakat melakukan pengungsian atau perpindahan penduduk dan tentang kehidupan mereka selama berada di tempat baru mereka. Maka dari itu penelitian ini diberi judul **“Pengungsi di Kota Parepare 1950-1965”**.

1.2. Lingkup Masalah

Menurut John Galtung dalam *Theory and Method of Social Research* mengenai sejarah sebagai ilmu diakronis (*diachronic*; *dia* [Latin, melalui] dan *chonicus* [Latin, Waktu]). Sejarah dikatakan demikian sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas.¹⁶ Dengan hal tersebut menulis mengambil batas waktu atau temporal mulai dari 1951 dikarenakan pada tahun ini kekacauan daerah ini kerap terjadi sehingga banyaknya orang yang mengungsi salahsatunya ke Kota Parepare dan juga ditahun 1951 sudah ada yang mengungsi akibat kekacauan. Hal itu disebabkan oleh makin resahnya masyarakat terhadap aksi gerakan DI/TII dan gerombolan, hingga penulis membatasi sampai tahun 1965, karena pada tahun tersebut kekacauan yang terjadi di Sulawesi Selatan yang di sebabkan oleh DI/TII dan gerombolan telah dapat diatasi.

¹⁶ Kuntowijoyo. *Pejelasan Sejarah (Historical Explanatio)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 5.

1.3. Rumusan Masalah

Komponen utama dalam penelitian adalah adanya masalah yang ingin dijawab. Masalah merupakan inspirasi terjadinya suatu penelitian. Menemukan suatu masalah serta memahaminya secara baik merupakan hal yang tidak mudah, dan yang harus dikuasai serta dilatih para ilmuwan. Masalah atau permasalahan ada jika ada kesenjangan antara *das Sollen* dan *das sein*, ada perbedaan antara apa seharusnya dan apa yang dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.¹⁷

Berdasarkan judul dan latar masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan pertanyaan yang dibahas, yaitu:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pengungsian penduduk?
2. Bagaimana kehidupan pengungsi di Kota Parepare?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Dapat memahami dan menjelaskan tentang keresahan yang ditimbulkan oleh DI/TII dan gerombolan dan dapat mengerti alasan pengungsi memilih Kota Parepare sebagai tujuan pengungsian.
2. Dapat mengetahui dan menjelaskan kelanjutan dari kehidupan orang-orang selama berada pada pengungsian.

¹⁷ Arlina G, Latief. *Komponen Dasar Penelitian*, (Makassar: Diktat, 1990), hlm. 39.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca, menjadi acuan untuk membuat karya ilmiah selanjutnya, dan menambah historiografi Sulawesi Selatan khususnya pengungsian akibat keresahan yang ditimbulkan oleh DI/TII dan gerombolan.
2. Memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

1.6. Tinjauan Pustaka

Kotamadya Dati II Parepare Selayang Pandang, tahun 1983, sebuah buku yang diprakarsai oleh pemerintah daerah Kotamadya Dati II Parepare. Buku ini berisikan tentang gambaran umum Kotamadya Parepare, iklim, adat istiadat, periode wali Kotamadya daerah tingkat II Parepare, kedudukan Kotamadya Parepare, perkembangan penduduk serta fasilitas sarana prasarana kota. Buku ini diketahui dan diterbitkan setelah mendapat persetujuan Oleh wali Kotamadya Parepare, Drs. A. Samad Tahir.

Buku yang ditulis Anhar Gonggong yang menjelaskan latar belakang Qahar Mudzakkar sebagai orang Bugis-Makassar¹⁸ yang lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Kampung Lanipa. Melalui tulisannya ini, Anhar Gonggong menggambarkan bagaimana Qahhar Mudzakkar saat menjadi TNI dan membela negara, hingga

¹⁸Anhar Gonggong. *Abdul Qahhar Mudzakkar, dari Patriot hingga Pemberontak*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 218.

lahirnya gerilya yang dipimpin oleh Qahhar Muzakkar, karena setelah perang kemerdekaan Qahhar memilih untuk berdiri bersebrangan dengan Republik. Alasan Qahhar memilih untuk bersebrangan dengan Republik dikarenakan adanya kekecewaannya terhadap pemerintah, karena keinginannya untuk menjadi komandan tentara di Sulawesi Selatan ditolak oleh pemerintah. Keputusan Qahhar memilih Islam sebagai ideologi gerakan dimana ia menyatakan diri sebagai bagian dari gerakan Kartosuwiryo di Jawa Barat, hingga kemudian memutuskan untuk memproklamkan berdirinya suatu negara Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) yang mana ia sendiri menjadi kepala negara. Pemberontakan Kahar Muzakkar sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, ia telah menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit, juga kehancuran harta benda yang tak terbilang. Pembangunan daerah ini di dalam era kemerdekaan telah terhambat akibat keamanan yang tidak stabil selama pemberontakan gerakan DI/TII berlangsung. Tetapi walaupun demikian, mungkin pemberontakan ini memiliki pula makna historis yang cukup penting. Dilihat dari usaha integrasi bangsa Indonesia, maka kenyataan masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk dengan sifat dan latar yang berbeda-beda, amat perlu memperoleh perhatian seksama.

Kajian lain oleh Barbara Sillars Harvey¹⁹ fokus membahas tentang politik militer. Dalam buku ini memberikan gambaran umum tentang Sulawesi Selatan di bawah kekuasaan Kolonial Belanda dan pada saat pendudukan Jepang. Penjelasan-

¹⁹ Barbara S Harvey. *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989b).

penjelasan tentang apa yang terjadi pada masa Revolusi, peristiwa kemerdekaan dan munculnya pemberontakan, Darul Islam di hutan, hingga gambaran-gambaran akhir pemberontakan. Dalam buku ini juga banyak menjelaskan dinamika militer yang terjadi khususnya di Sulawesi Selatan, juga menggambarkan kondisi kemanan dan politik. Pada tahun 1950-an sebagian besar dihadapi di Sulawesi Selatan adalah pemberontakan. Kerusuhan ini muncul ketika orang-orang yang berjuang dalam revolusi tidak diberi status resmi dalam Tentara Nasional, pemberontakan Kahar Muzakkar merujuk suatu kenyataan bahwa hubungan pusat dan daerah sangat lemah dan tidak efektif. Dampak terhadap masyarakat dari adanya pemberontakan Kahar Muzakkar membuat hidup mereka dalam keadaan serba salah, mereka harus meninggalkan kampung halamannya ketika mereka tidak setuju dengan DI/TII dan apabila mereka sepemahaman dengan DI/TII mereka harus menerima seandainya mereka dicap sebagai seorang pemberontak.

Buku yang ditulis oleh Muh.Said.²⁰ Menjelaskan tentang penyebab masyarakat Enrekang bermigrasi. Permasalahan yang mereka alami disebabkan oleh gerombolan, buku ini juga membahas tentang dampak adanya gerombolan bagi kehidupan masyarakat Enrekang dari segi keamanan, ekonomi, dan juga sosial. Selain itu buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Enrekang datang ke Kota Parepare serta kehidupannya selama berada di Kota Parepare, dari segi pekerjaan dan, tempat tinggal.

²⁰ Muh. Said. *Migrasi Orang Enrekang ke Parepare 1950-1965*, (Parepare: Sampan Institute, 2019), hlm. 31.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu: (1) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sumber), (4) interpretasi: analisis dan sistensis, dan (5) penulisan sejarah.²¹ Penelitian ini dilakukan berdasarkan tahap-tahap tersebut.

Pengumpulan data (heuristik) : merupakan cara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, baik itu yang sifatnya primer maupun sifatnya sekunder. Pencarian sumber Primer pada penelitian ini mengunjungi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya yaitu arsip Parepare (1881-1981), arsip Provinsi Sulawesi (1950-1960), Arsip Majene (1951-1961), Arsip Barru (1920-1976), Arsip Sidrap (1950-1978), Arsip Pinrang (1947-1985), Arsip Enrekang (1890-1971), Arsip Polmas (1918-1983), Arsip Sulawesi Selatan (1950-1960) dan Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi (1946-1960). Dengan mengunjungi arsip penulis mendapatkan sumber yang berhubungan dengan judul penelitian seperti arsip dengan nomor registrasi 477 tentang perpindahan penduduk akibat kekacauan dan penulis menemukan ada arsip yang berisi tentang perpindahan penduduk akibat gerombolan seperti dari daerah Enrekang ke Parepare. Arsip nomor registrasi 260 mengenai keputusan presiden tentang pembentukan panitia negara penampungan korban kekacauan. Arsip nomor registrasi 184 mengenai pengungsi-pengungsi akibat gerombolan seperti beberapa daerah di Pinrang dan Barru yang

²¹ Kuntowijoyo, *Op.Cit.*, hlm. 89.

memilih mengungsi ke Parepare. Arsip nomor registrasi tentang pembangunan yayasan Rehabilitas untuk para pengungsi. Arsip nomor registrasi 245 mengenai pengungsi dari Alitta dan Mamuju akibat kekacauan gerombolan. Kemudian untuk pengumpulan data sekunder, penulis melakukan pencarian sumber-sumber berupa jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan dengan teori yang dibahas, serta melakukan wawancara yaitu dimaksud ntuk menambah keterangan tentang data-data yang diperoleh dalam penelitian.

Kritik sumber untuk menguji tingkat validitas, otentisitas dan kredibilitas sebuah sumber sejarah penulis melakukan kritik sumber. Manfaatnya untuk menyaring sumber-sumber yang asli dan mana yang palsu. Kritik sumber dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu : *pertama*; Kritik *eksternal* (keluar) adalah usaha mendapatkan otentisitas (keaslian) sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Seperti mencari keaslian bahan, waktu dan bahasa yang dipergunakan. *Kedua*; Kritik *internal* (dalam) adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan, dan lain-lain. Kritik internal ditujukan untuk memahami isi teks. Pertentangan sumber-sumber yang diperoleh, kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing. Selanjutnya adalah penyatuan sumber-sumber yang telah lulus seleksi.

Interpretasi : pada tahap ini, penulis diharapkan memberikan tafsiran-tafsiran yang dimaksud untuk memperoleh kesimpulan sebagai bahan dalam menyusun kisah sejarah. Kuntowijoyo menguraikan bahwa interpretasi terdiri dari dua macam, yaitu

analisis dan sistensis.²² Analisis berarti menguraikan sumber untuk mendapatkan fakta-fakta sementara, sistensis dilakukan untuk kemudian menyatukan fakta-fakta tersebut untuk mendapat bentuk kesimpulan.

Historiografi : tahap ini adalah penulisan sejarah yang selalu memperhatikan metode diatas. Berdasarkan metode diatas, hasil penulisan ini disampaikan secara sistematis mengikuti kronologis peristiwa dengan menggunakan deskriptif narasi. Bentuk penulisan semacam inilah yang menggambarkan peristiwa semata melainkan menghasilkan bentuk penulisan sejarah kritis. Kemudian bentuk dari rekaman dan peninggalan masa lampau ini akan disusun secara sistematis dengan topik yang jelas sehingga mudah dimengerti agar pembaca mudah memahaminya.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB 1 : Berisi uraian penelitian, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Mengenai gambaran umum Kota Parepare yang berisi tentang keadaan alam diantaranya membahas letak geografis, iklim dan cuaca serta keadaan tanah. Selanjutnya membahas tentang penduduk dan mata pencarian serta poin terakhir adalah menjelaskan sejarah singkat Kota Parepare sampai tahun 1950.

BAB III : Menjelaskan sebab orang-orang mengungsi, apa yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung halamannya dan memilih untuk

²² *Ibid.*, hlm. 99.

mengungsi, dalam sub babnya adalah pembahasan gangguan keamanan, krisis ekonomi dan keresahan sosial.

BAB IV : Membahas tentang kehidupan pengungsi di Kota Parepare, menjelaskan bagaimana mereka datang di Kota Parepare, setelah sampai di tempat pengungsian apa yang mereka lakukan, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana peran pemerintah dalam menangani pengungsi selama di Kota Parepare.

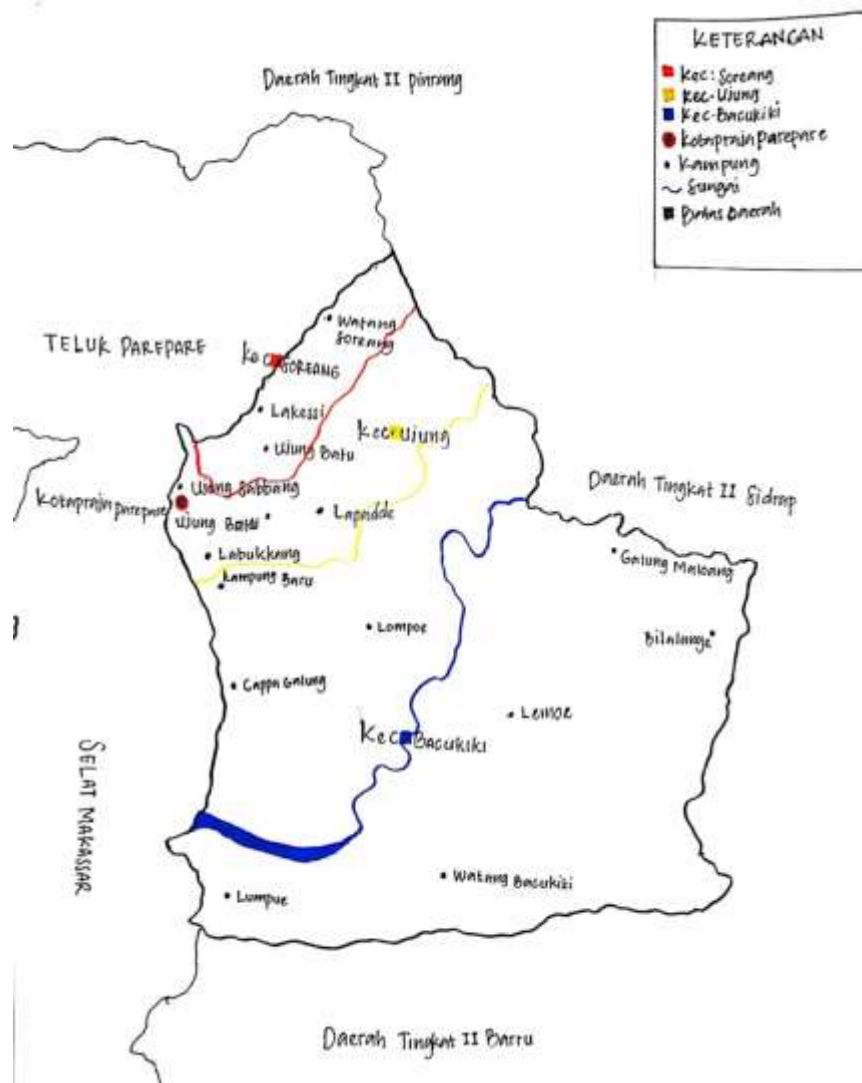
BAB V : Merupakan penutup yang membahas kesimpulan dari keseluruhan pembahasan atau isi tulisan serta terakhir adalah sebuah saran

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Keadaan Alam

2.1.1 Letak Geografis

Gambar 2. Peta Kota Parepare tahun 1961²³



²³ Arsip Parepare Vol. 1 Periode Tahun 1889-1981. Reg 1926, Dinas Pekerjaan Umum Parepare: Peta Kotapraja Parepare.

Setiap daerah maupun kota memiliki sejarahnya tak terkecuali Parepare. Menurut Bagoes P. Wiryomartono berdirinya kota-kota di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan proses terbentuknya pemukiman-pemukiman awal di berbagai tempat. Pemukiman-pemukiman ini menurutnya ada yang menjadi kota, dengan berbagai dorongan dari unsur-unsur eksternal, tetapi ada juga yang tidak.²⁴

Sebuah kota dapat berubah dari waktu ke waktu karena faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi perubahan kota tersebut. Perubahan dalam hal ini memiliki beberapa faktor yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, maupun perubahan dalam bentuk fisik. Perubahan bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah di kota tersebut atau bahkan karena adanya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Semakin lama kota akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan bagaimana proses yang dilakukan masyarakat yang berada di dalam kota tersebut.

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar, meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit, berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5°C dengan suhu minimum 25,6 oC dan maksimum 31,5°C.²⁵

Kota Parepare merupakan kota kedua terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di kategorikan sebagai “kota sedang”. Kota ini adalah pusat kawasan

²⁴ Purnawan Basundoro. *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 25.

²⁵ <https://sulselprov.go.id/> Kota Parepare – Provinsi Sulawesi Selatan. (Diakses Pada 25 Agustus 2020, Pukul 22.36 WITA).

pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, Kabupaten Rappang, dan Kabupaten Pinrang sehingga sangat potensial sebagai pusat perdagangan di kawasan tersebut.

Letak geografis Kota Parepare yang sangat strategis karena berada dipertengahan jalur lalu lintas darat dan laut di antara Palopo ke Makassar dan Mamuju ke Makassar, selain itu Kota Parepare juga mempunyai pelabuhan besar sebagai tempat penyebrangan antar pulau, menjadikan kota ini ramai dikunjungi dan didatangi, terutama yang berasal dari daerah tetangga yang jaraknya dekat dengan kota ini. Kota Parepare menempati garis 030-060 lintang selatan dan 1180-1210 bujur Timur 155 km di sebelah utara Makasar, ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² yang secara Geografis terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kota ini memiliki posisi strategis dalam lintas perdagangan baik antar daerah maupun antar pulau. Hal ini didukung karena merupakan kota pelabuhan yang menghubungkan antara kota Parepare dengan berbagai daerah di Indonesia bahkan langsung ke Malaysia, disamping itu Parepare juga merupakan jalur lalu lintas darat yang menghubungkan berbagai daerah khususnya ke daerah-daerah utara seperti Pinrang, Sidrap, Tana Toraja, Enrekang, Luwu dan juga merupakan jalur Trans Sulawesi.²⁶ Parepare menjadi pusat pemerintahan yang membawahi empat daerah dan

²⁶ Dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Sulawesi Selatan, *Pemerintahan Daerah Kotamadya Parepare Volume I Periode tahun 1889-1981*, (Makassar: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017), hlm. vi.

menjadi daerah yang lebih berkembang di antara daerah lainnya.

Kota Parepare dilihat dari segi geografisnya merupakan daerah yang letak posisinya dilintasi oleh jaringan jalur regional, yaitu Parepare – Makassar, Makassar – Tanah toraja, Makassar – Mamuju, Makassar Palopo, Makassar – Wajo – Soppeng, disamping itu juga menjadi jalurlintas trans Sulawesi antara Makassar – Kalimantan, Makassar – Palu, dan Makassar – Manado.²⁷ Jalur transportasi darat sudah sangat memadai mengingat terbitnya rencana pemerintahan dan pengaspalan jalan sebagai jalan raya di beberapa daerah sepanjang Sulawesi bagian Selatan yang dibuat oleh Asisten Residen De Wilde de Ligny pada tahun 1929.²⁸

Secara administrasi pada tahun 1961, Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara mengeluarkan Surat keputusan No. 1100 tanggal 16 Agustus yang membagi Kotamadya Parepare sebanyak 3 kecamatan yang terdiri atas:

1. Bacukiki, dengan tempat kedudukannya di Sumpang Binangae dan meliputi kampung-kampung seperti Kampung Baru, Cappagalung, Pangkoro, Tonrangeng, Lumpue, Watang Bacukiki, Manginpuru, Labeua, Lontange, Lompoe, Galung Maloang Lawalane, Caramele dan Bilalange.

²⁷ Umar, *Buruh Pelabuhan di Parepare 1961 – 1998*, (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hanuddin, 2009), hlm. 20.

²⁸ Renata Lilianny, *Pasar Lakassi di Parepare 1956 – 1965*, (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Parepare, 2019), hlm. 20.

2. Ujung, dengan tempat kedudukan pemerintahannya di Ujung Sabbang meliputi kampong-kampung seperti Ujung Sabbang, La Padde, Bulu Songae, Ujung Bulu dan Labukkang.
3. Soreang, dengan tempat kedudukan pemerintahannya di Parepare meliputi kampung-kampung seperti Ujung Baju, Lakessi dan Watang Soreang.²⁹

Dari luas seluruh wilayahnya, Kota Parepare merupakan areal yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Kurang lebih 85% wilayah Parepare terdiri atas perbukitan, bergelombang, dan bergunung, selebihnya sekitar 15% dengan topografi datar yang berada dibagian barat merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kota Parepare. Ketinggian rata-rata wilayahnya 25m dari permukaan laut, sedangkan ketinggian bagian berbukit mencapai 500m dari permukaan laut.³⁰ Kedudukan strategis tersebut merupakan salah satu modal besar dalam membangun ekonomi. Hal ini juga menempatkan Kota Parepare pada kedudukan sebagai pusat wilayah pengembangan bagian tengah Sulawesi Selatan dengan daya dukung tetangga (*Supporting-Hitterland*).³¹

Letak strategis itulah yang menjadi salah satu faktor yang menunjang Kota Parepare untuk dapat melakukan peran-peranannya dalam pengembangan wilayah

²⁹ Dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Sulawesi Selatan, *Op.Cit.*, hlm. Viii.

³⁰ Renata Liliyany, *Op.Cit.*, hlm. 21.

³¹ *Ibid.*, hlm. 22.

secara lokal, bahkan secara nasional. Dalam kondisi seperti ini peran perekonomian Kota Parepare sangat penting.

2.1.2 Iklim dan Cuaca

Kondisi iklim di wilayah Kota Parepare terbagi dalam dua zona yakni zona hujan dan zona kemarau. Zona hujan ditandai dengan jumlah bulan basah sekitar 5-6 bulan sedangkan bulan kering 2-3 bulan. Zona hujan meliputi wilayah bagian Barat Kota Parepare sampai pesisir pantai dengan luas $\pm 60\%$ dari luas wilayah Kota Parepare. Sedangkan zona kemarau meliputi wilayah bagian Timur Kota Parepare dengan luas $\pm 40\%$ dari luas wilayah Kota Parepare. Dengan demikian, Kota Parepare didominasi oleh iklim tipe C2 (zona hujan) dimana jumlah bulan basah lebih dominan dibandingkan bulan kering.³²

Wilayah Kota Parepare memiliki dua pola musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dari data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pengamatan Kecamatan Ujung menunjukkan bahwa rerata curah hujan tahunan berkisar 1796 mm/tahun. Curah hujan bulanan yang terjadi di wilayah ini umumnya lebih kecil dari 400 mm/thn kecuali pada bulan desember. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 40-428 mm dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi pada bulan desember. Curah hujan tertinggi di Kota Parepare adalah 556 mm/thn dan terendah menunjukkan angka 0 mm/tahun atau nol hari pada Bulan Agustus di Kecamatan Bacukiki. Rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5-5,8

³² S. docworkspace.com, *Buku Putih Parepare*, (Diakses pada hari Senin 21 September 2020, Pukul 09.22 WITA).

m/detik yang bertiup dari arah Barat ke Timur selama Bulan November sampai April, sedangkan temperature suhu udara rata-rata berkisar 28,1-28,8 °C.³³

2.1.3 Keadaan Tanah

Tatanan stratigrafi pada umumnya terdiri dari endapan Aluvium, Miosen tengah-tengah akhir serta Eosen akhir Miosen tengah dengan sedikit terobosan Andesit. Endapan Aluvium terdiri dari lempung pasir, lumpur, kerikil dengan bongkah batuan yang tidak padu (lepas). Endapan ini berasal dari hasil disintegrasi batuan yang lebih tua. Struktur tanah yang terbentuk meliputi jenis tanah entisol, inceptisol, dan ultisol. Morfologi dataran rendah dan pantai terdapat disebelah barat, memanjang dari utara ke selatan dan umumnya diisi oleh endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi untuk pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Sedangkan morfologi perbukitan dengan ketinggian $\pm 50 - 200$ meter dari permukaan laut yang berada pada bagian tengah ke arah Timur dan Selatan pada umumnya wilayah perbukitan yang berpotensi untuk pengembangan perkebunan.³⁴

2.2 Penduduk dan Mata Pencarian

Setiap tahun pertumbuhan penduduk di Kota Parepare mengalami peningkatan dikarenakan bukan saja penduduk asli orang bugis yang mendiami Parepare tapi juga banyak pendatang ke Kota Parepare dan memilih untuk menetap.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Faktor pendorong banyaknya pendatang yaitu faktor ekonomi, sosial dan juga bisa jadi karena faktor keamanan.

Pada umumnya daerah Parepare banyak dihuni oleh para orang Bugis, di Pantai Barat bermula dari arah selatan ke utara orang Bugis tinggal di Tanete, Parepare, Sawitto serta Batulappa,³⁵ hal ini pula dapat dibuktikan dengan penggunaan bahasa dan tempat tinggalnya.

Penduduk yang mendiami Kota Parepare sebagian besar adalah masyarakat suku Bugis Makassar, disamping suku – suku lainnya, yaitu Toraja, Mandar dan Jawa. Oleh karena itu, pola sistem sosial penduduk Kota Parepare pada dasarnya berpola pada sistem sosial masyarakat suku Bugis.³⁶ Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selain penduduk asli dari suku-suku tersebut diatas, masih ada orang-orang asing lainnya.

Sebelum tahun 1950 penduduk Kota Parepare merupakan penduduk ke-5 terbanyak setelah Luwu dan Makassar menempati posisi pertama yaitu 672, 365 penduduk. Pada saat itu Kota Parepare memiliki penduduk lokal sebanyak 367,683, Eropa 175, Cina 765 dan Asia Asing sebanyak 1,465 Penduduk dengan jumlah 370,088.³⁷ Jumlah penduduk Kota Parepare pada awal perang kemerdekaan adalah

³⁵ Abd. Latif. *Para Penguasa Ajatappareng. Refleksi Sejarah Sosial Orang Bugis*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 5.

³⁶Sistem Sosial dari masyarakat Suku Bugis pada umumnya sebagian besar adalah seorang pelaut, bersifat pemberani, ramah, namun juga rajin bercocok tanam.

³⁷ Barbara S Harvey. *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 17.

492,555 orang.³⁸ Pada tahun 1952 melonjak menjadi 550.011 orang. Hal tersebut kurang lebih dipengaruhi karena banyaknya pendatang dari daerah lain yang masuk ke Kota Parepare untuk berdagang, lalu memutuskan untuk menetap. Kurang lebih 7 tahun terakhir pertambahan penduduk Kota Parepare sebanyak 57.456 orang.

Banyak orang-orang yang datang dari luar daerah untuk mencari keamanan di Kota Parepare karena banyak tekanan yang mereka dapatkan dikampung mereka sebelumnya, bukan hanya karena faktor keamanan melainkan faktor ekonomi. Ada pula yang datang dari daerah ke Kota Parepare untuk mencari pekerjaan. Ada juga orang-orang asing lainnya yg berasal dari China, Arab, dan Eropa ke Kota Parepare. Masuknya orang asing yang berasal dari China, Arab, dan Eropa ke Kota Parepare ini dikarenakan adanya kegiatan pelayaran yang pada umumnya adalah pedagang. Namun lambat laun mereka menetap dan berbaur dengan masyarakat asli yang mendiami Kota Parepare, selain itu untuk mencari pekerjaan seperti penduduk asli lainnya.

Kondisi Kota Parepare yang terdiri atas pantai dan perbukitan, cukup kompleks dan lengkap untuk semua jenis pekerjaan bagi masyarakat pendatang. Pada tahun 1950-an, pendatang dari daerah agraris masih bisa bertani dan cukup tersedia lahan di Parepare. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang. Biasanya mereka yang datang dari daerah tetangga Parepare memilih wilayah yang berbukit-bukit karena kebiasanya mereka yang bercocok tanam di tanah yang landa dan juga daerah

³⁸ Sarita Pawiloy. *Arus Revolusi di Sulawesi Selatan*, (Ujungpandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi Sulawesi Selatan, 1987), hlm. 17.

perbukitan Kota Parepare masih sepi penduduk hal itu disebabkan karena kepadatan penduduk dan aktivitas yang lebih dominan di daerah daratan rendah. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk (saat ini) yang mendiami daerah perbukitan.³⁹ Di daerah perbukitan Parepare merupakan wilayah pertanian yang kebanyakan masyarakatnya menanam Ubi, ketika mereka mulai panen, hasil pertaniannya di bawa turun ke Kota untuk dijual menggunakan *Bendi* (salah satu alat tranfortasi dalam Bugis).

Sedangkan orang-orang yang yang berada pada daerah dataran rendah atau sekitar pesisir yang juga merupakan pusat kota Parepare sebagai penggerak perekonomian kebanyakan merupakan pedagang, baik pedagang yang menetap atau pedagang yang datang dari daerah lain di luar kota Parepara, pedagang tersebut banyak datang di Kota Parepare karena adanya pelabuhan yang nantinya akan membawa dagangan mereka ke luar daerah seperti ke Kalimantan, ataupun barang dari luar masuk ke Parepare. Di daerah Pesisir yang lain Nampak mata pencarian sebagian penduduk Kota Parepare adalah sebagai seorang nelayan.

2.3 Sejarah Singkat Parepare Sampai Tahun 1965

Di awal perkembangan, perbukitan yang sekarang ini disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-seling oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh

³⁹ Muh. Said. *Migrasi Orang Enrekang ke Parepare 1950-1965*, (Parepare: Sampan Institute, 2019), hlm. 48.

secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran dinamakan Kota Parepare.⁴⁰

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan istana dan pergi ke Selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena memiliki hobi memancing, wilayah tersebut dikenal dengan kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni kerajaan Bacukiki.

Kata Parepare diterangi sebagian orang berasal dari Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, raja Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dengan spontan mengucapkan “Bajiki Ni Pare” yang artinya “(Pelabuhan di kawasan ini) dibuat dengan baik”. Parepare banyak dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang di kawasan Suppa.⁴¹

Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna “Kain Penghias” yang digunakan di acara semisal pernikahan, hal ini dapat dilihat dalam buku lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid 2 hal [62] baris n0. 30 yang berbunyi “pura

⁴⁰ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, *Op. cit.*, hlm. vi.

makkenna linro langkana PAREPARE” (KAIN PENGHIAS depan istana sudah dipasang).

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung yang didepannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting dibagian tengah Sulawesi Selatan. Disinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merembah seluru daratan timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatapparang.⁴²

Surat Keputusan Jenderal Belanda, yaitu H.N.A Swart pada tanggal 31 Desember 1906 dimana periode 1906-1916 membagi wilayah administrative di Sulawesi Selatan dan daerah taklukkannya menjadi tujuh bagian wilayah pemerintahan *Afdeeling*. Wilayah pemerintahan afdeeling tersebut adalah *Afdeeling* Bone berpusat di Bone, *Afdeeling* Pare-pare berpusat di Pare-pare, *Afdeeling* Luwu berpusat di Luwu, *Afdeeling* Mandar berpusat di Majene, *Afdeeling* Bantaeng berpusat di Bantaeng, dan *Afdeeling* Buton serta Laiwui berpusat di Bau-bau.⁴³

Pada zaman Hindia Belanda khususnya di Sulawesi Selatan pada saat keberhasilan mereka dalam perang yang berakhir pada tahun 1905, membuat mereka mengatur kembali sistem adminstrasi pemerintahan di daerah ini yang disebut

⁴² *Ibid.*, hlm. vii.

⁴³ Andi Karlina R. *Komunitas Tionghoa di Parepare 1906 – 1959*, (Makassar,:Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 24.

*Afdeling*⁴⁴. Seperti di Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controleur atau Gezaghebber sebagai pimpinan pemerintah (Hindia Belanda), dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang, dan Onder Afdeling Parepare. Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controleur atau Gezaghebber. Disamping adanya aparat Hindia Belanda tersebut, struktur pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja Bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Adattuang Sidenreng Rappang di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addattuang Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi. Struktur pemerintahan ini berjalan hingga pecahnya perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda yang digantikan dengan Jepang sekitar 1942.⁴⁵

Pada saat Jepang mulai berkuasa di Indonesia pada tanggal 1942 seluruh system pemerintahan yang telah dibentuk pada zaman pemerintahan Hindia Belanda tidak serta merta dirombak melainkan hanya diganti namanya saja dengan istilah-istilah sebagai berikut.

⁴⁴ Untuk menata administrasi pemerintahan di wilayah ini, pemerintah Hindia Belanda membaginya kedalam tujuh wilayah bagian pemerintahan (*Afdeling*). Ketujuh wilayah bagian ini adalah Makassar, Bonthain, Bone, Parepare, Luwu Mandar dan Buton dan pesisir timur Sulawesi (*Boeton en Ooskust Celebes*). Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara, (Editor). *Sejarah Sulawesi Selatan. Jilid 2*, (Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Penelitian dan pengembangan Daerah, 2005), hlm. 47.

⁴⁵ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, *Op. cit.*, hlm. vi.

- Residen diganti dengan Syu
- Stadgemente atau Kotapraja diganti dengan Si
- Afdeling diganti dengan Ken
- Onder Afdeling diganti dengan Buken
- Distrik diganti dengan Gun
- Onder Distrik diganti dengan Son

Sedangkan untuk nama-nama kepala pemerintahannya masing-masing sebagai berikut:

- Keresidenan dipimpin oleh Minseibu-tyookan
- Ken dipimpin oleh Ken Kanriken
- Bunken dipimpin oleh Buken Kanriken
- Syuu dipimpin oleh Syuutyoo
- Gun dipimpin oleh Guntyoo
- Son dipimpin oleh Sontyoo

Bila dilihat hal tersebut di atas maka Parepare pada zaman Hindia Belanda setingkat dengan Afdeling dan ketikan zaman pemerintahan Jepang, Parepare berstatus Kenkanrikan.⁴⁶

Pada saat proklamasi kemerdekaan 1945, daerah Parepare merupakan daerah yang sangat penting juga yang ada di Sulawesi Selatan, karena pada saat itu daerah ini dijadikan sebagai pusat kegiatan pemuda pendukung kemerdekaan bersama

⁴⁶ *Ibid.*, hlm vii-vii.

dengan Makassar dan Palopo. Kota Parepare merupakan kota tersibuk kedua setelah Makassar dalam masa awal proklamasi. Di kota ini telah lama dikembangkan ide kemerdekaan lewat pergerakan politik. Usia pergerakan telah ada 17 tahun ketika proklamasi dikumandangkan di Jakarta. Tercatat PSII yang lebih dominan di tempat ini, kemudian Muhammadiyah. PSII tersebar di Sulawesi Selatan, pada umumnya dikembangkan di Parepare. Tokoh utama dan paling berpengaruh di Parepare dan sekitarnya ialah Andi Abdullah Bau Massepe, ia merupakan datu Suppa, dan pada masa Jepang sebagai Bunken Kanrikang. Orang kuat kedua ialah Andi Makkasau, datu Suppa yang digantikan oleh Bau Massepe.⁴⁷

Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan Undang-Undang No1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-Undang No.2 tahun 1948, dinamakan struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada kepala Daerah atau kepala Pemerintahannya Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam asistem Residen atau Kenkanrikan.

Pada waktu status Parepare masih menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan dengan keluarnya Undang-Undang No.29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan maka ke-empat Order Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten II

⁴⁷ Sarita Pawiloy, *Op. cit.*, hlm. 93.

Baru, Kabupaten Tingkat II Sidenreng Rappang, Kabupaten Tingkat II Enrekang, Kabupaten tingkat II Pinrang, sedang Parepare sendiri bestatus Kotapraja Tingkat II Parepare.⁴⁸

Kota Pare-pare pada tahun 1960 merupakan suatu kurun waktu yang cukup penting dalam perjalanan sejarah Kota Pare-pare sendiri dan memerlukan penanganan yang cukup berat. Walikota pertama Andi Mannaungi dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar. Termasuk dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang harus ditetapkan dalam kepemimpinannya. Seperti kebijakan penanganan dalam masalah ekonomi, misalnya pajak, perdagangan, dan ekspor impor komoditi-komoditi yang terdapat di daerah Supporting – Hitterland yang melalui Kota Parepare.⁴⁹

Perlu diketahui bahwa pada masa awal terbentuknya Daerah Tingkat II Parepare suhu politik di Indonesia yang khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan belum stabil, gerakan kelompok DI-TII masih hangat, pengaruh dan tokoh-tokohnya masih berkeliaran di tengah-tengah masyarakat, yang sangat susah dimusnahkan. Di samping gerakan DI-TII, PKI pada masa itu juga sementara di puncaknya untuk menentukan kelompoknya menjadi kelompok penguasa, hal ini mengakibatkan hancurnya sistem politik di Indonesia.

⁴⁸ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, *Loc.Cit.*

⁴⁹ Mehawati, *Kotamadya Pare-pare pada Masa Pemerintahan H. Andi Mannaungi 1960 - 1965*. (Ujung Pandang, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1992). hlm. 49

Sebagai orang pertama yang merintis suatu daerah Kotapraja Parepare tentunya banyak menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Pada masa pengangkatan H. Andi Mannaungi sebagai Walikotamadya Parepare pada tahun 1960 keadaan politik di Indonesia, dan di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya belum stabil. Sekitar tahun 1960 dikenal masih berada dalam kurun waktu Orde Lama, yang dekat dengan masa peralihan ke Orde Baru, pada masa ini berbagai kelompok ingin menonjolkan diri dalam usaha memegang kekuasaan di daerah yang belum mapan, pergolakan DI/TII di Sulawesi Selatan sangat menghancurkan tatanan pemerintahan yang ada di Sulawesi Selatan.⁵⁰

Terputusnya system *Afdeeling* di Parepare maka pada saat itu juga Parepare resmi menjadi sebuah Kotamadya pada tanggal 17 Februari 1960, yang ditandai dengan pengambilan sumpah Walikota yang pertama yaitu H. Andi Mannaungi, dan sekaligus hari itu dijadikan sebagai hari lahirnya Kotamadya Parepare.⁵¹

Dengan diangkatnya H. Andi Mannaungi sebagai Walikotamadya Parepare maka mulailah aktivitas pemerintahan berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan disana sini, tetapi namun demikian beliaulah sebagai perintis kepemimpinan di Kota Pare-pare yang masih sangat rawan dari gangguan gerombolan pengacau liar, seperti DI/TII dan Komunis.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 41

⁵¹ Gulyati Pasambe., *Op.cit.* hlm. 23.

⁵² Mehawati, *Op. Cit.* hlm. 65

Adapun tentang latar belakang yang turut mempengaruhi pembentukan Daerah Tingkat II dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu terdapat tiga faktor. Pertama, berlakunya UU No. 1 Tahun 1957 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang mengkehendaki pembentukan Daerah Tingkat II. Kedua, adanya pendapat-pendapat atau keputusan dari panitia negara yang menginginkan adanya pembentukan daerah-daerah swapraja. Ketiga, keinginan yang kuat dari masyarakat agar sesegera mungkin diadakan pembentukan daerah swatantra. Sehingga yang melatar belakangi pembentukan Daerah Tingkat II adalah adanya perpaduan kepentingan antara kebijaksanaan pemerintah pusat dengan dukungan dan keinginan masyarakat daerah yang sangat kuat dalam menyikapi pembentukan daerah tersebut.⁵³

Namun kemudian, pada tahun 1963 istilah Kota Praja Parepare diganti menjadi Kotamadya Pare-pare, dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka istilah Kotamadya diganti lagi menjadi Kota Parepare, dan istilah tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Parepare menjadi daerah yang sangat penting karena ditunjang oleh keberadaan pelabuhannya, sehingga para kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang berebut kekuasaan di daerah ini, musilkan antara Kerajaan Sidenreng Rappang dan

⁵³Syukriyati. *Kota Parepare Tahun 1960 -1997. (Suatu Tinjauan Morfologi Kota)*. (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2002). hlm. 19.

Kerajaan Bone. Sebegitu pentingnya daerah ini sehingga dijadikan sebagai daerah *Afdeling* dibawah pemerintahan Belanda yang merupakan pusat pemerintahan setelah Makassar.